**BAB I** **PENDAHULUAN**

# Latar Belakang

Isyu keamanan internasioanl yakni bagian dari studi hubungan internasional. Di sini, konsep keamanan telah berkembang melalui perdebatan yang tidak lagi fokus pada keamanan tradisional (politik dan militer) dan non-tradisional (manusia dan alternatif). Konteks historis yang terkait dengan ruang dan waktu juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan penting teks keamanan.(Rachman & Bainus, 2017) Mengutip Morgenthau, tujuan dasar dari semua upaya ilmiah adalah untuk menemukan kekuatan yang mendasari fenomena sosial dan bagaimana mereka beroperasi.(Padelford & Morgenthau, 1949, p. 3) Terkait hal ini, Permasalahan Laut China Selatan dilatarbelakangi oleh tiga (3) faktor, yaitu politik, ekonomi dan strategis. Tiga dari faktor ini adalah motif utama bagi Negara Penggugat untuk memperjuangkan hak mereka di Laut China Selatan. Spratly dan Paracel menjadi objek perselisihan para pihak di Laut China Selatan (Wiranto, Juwana, Sutisna, & Buntoro, 2015).

Sejak tahun 1970-an, negara-negara mulai mengklaim kedaulatan atas pulau dan wilayah di Laut China Sealatan, termasuk kepulauan Spratly yang kaya akan sumber daya dan daerah penangkapan ikan (Blackwell, 2019). Eskalasi sengketa terus saja terjadi antar negara pengklaim, yaitu China, Taiwan, Vietnam, Malaysia, Filipina, serta Brunei Darussalam (Haryanto & Darmawan, 2017, p. 278).

Pemberitaan di media cenderung menyoroti persaingan dan pertikaian kekuatan militer antara China, Vietnam, dan Filipina. Lebih lanjut, Agus dan Arief berpendapat bahwa kekuatan China saat ini semakin dihormati oleh dunia, terutama kemajuan ekonomi, dan perubahan kebijakan luar negeri AS menjadi *high intervention profile* di kawasan Pasifik. (Haryanto & Darmawan, 2017). Melihat komposisi atas geografi kawasan Laut China Selatan, beberapa negara yang tergabung dalam ASEAN yakni Brunei Darussalam, Malaysia, Vietnam serta Filipina merancang *reclaiming claim* yang dilakukan China atas Kawasan Laut China Selatan.

Gambar 1-Laut China Selatan (Herscovitch, 2017, p. 2)

Selama ini Indonesia tidak ikut mengklaim wilayah Laut China Selatan, tetapi memiliki kepentingan nasional guna menjaga wilayah serta kedaulatannya. Tentunya berdaulat selaku negara yang berhak atas menggali serta mengeksploitasi sumber

daya alam di laut, termasuk di bawah laut. Kepentingan Indonesia di laut harus diperjuangkan selaku bentuk kelangsungan hidup, atas kedaulatan serta hak berdaulat atas perairan serta yurisdiksi Indonesia yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, karena menyangkut kehidupan bangsa Indonesia, serta kepentingan utama, seperti menjamin keselamatan maritim, keselamatan navigasi dari ancaman kekerasan serta pelanggaran hokum kejahatan transnasional serta keamanan lingkungan, yang yakni atas kepentingan yang bersatu atas negara-negara di kawasan itu (Wiranto et al., 2015).

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengumumkan rencana guna mengerahkan tiga fregat, lima jet tempur F-16 serta satu batalion tentara ke Ranai, dengan mengatakan kepada wartawan: “Natuna yakni pintunya; jika pintu tidak dijaga, maka perampok akan masuk (Connelly, 2016). Indonesia di bawah Jokowi tidak berusaha guna menghukum Beijing dengan menciptakan hambatan investasi, meledakkan kapal penangkap ikan China yang ditangkap, atau mengambil sikap yang lebih kuat kepada diplomasi regional. Pasca kejadian tersebut, perilaku *Coast Guard* China di sekitar Kepulauan Natuna relatif terkendali. Menteri Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan kepada wartawan kalau kapal penangkap ikan China belum terlihat di perairan sekitar Natuna. Kehadiran nelayan China di sekitar Kepulauan Natuna tampaknya bersifat musiman. Berdasarkan pola masa lalu, mereka bisa kembali antara Maret serta Juli 2017. Jika mereka melakukannya, serta insiden antara Angkatan Laut Indonesia atau kapal penegak hukum serta Penjaga Pantai China meningkat hingga menimbulkan korban jiwa bagi Indonesia, mungkin sulit bagi

Jokowi guna melakukannya. menekan (Connelly, 2016). Mengingat sentimen anti- China di dalam negeri meningkat cukup pesat sejak pembangunan kereta api berkecepatan tinggi Indonesia-China serta investasi di sektor lain oleh pemerintah China.

Seperti, premis kekuatan laut yakni ketidakpercayaan antara kekuatan besar, terlepas dari perdagangan mereka (Gompert, 2013)*.* Premis atas kekuatan laut atau *sea power* memang benar adanya. Dalam konteks keamanan nasional, Indonesia serta China (sebagai *big power*) mengalami ketegangan di Kepulauan Natuna. Akan tetapi, di sektor ekonomi—baik perdagangan maupun investasi, hubungan Indonesia-China cukup baik. Terlebih kebijakan Poros Maritim Indonesia, saat kampanye Jokowi lalu, memiliki sebuah keselarasaan dengan *Belt Road Initiative* dari China, yakni membangkitkan jalur perdagangan internasional atau jalur sutera darat serta laut.

Mengingat, Amerika Serikat di bawah Obama mengeluarkan kebijkan *pivot to asia* selaku upaya mengantisipasi kebangkitan China selaku kekuatan baru di global. Amerika Serikat pun menginisiasi kerjasama di bidang eknomi, yakni *Trans-Pasific Partnership* (TPP). Namun, peralihan kepemimpinan dari Obama ke Donald Trump, Amerika Serikat mundur dari TPP serta berusaha menerapkan kebijakan baru guna kawasan pasifik, yakni Indo-Pasifik. Selepas mundur dari TPP, Amerika Serikat kemudian melakukan perang dagang guna melumpuhkan atau membuat rugi ekonomi dalam negeri China. Sehingga, dampak perang dagang bagi China yakni menurunnya nilai neraca perdagangan, ekspor-impor yang berujung pada aktivitas China di Laut China Selatan serta eskalasi konflik.

Namun, dalam penelitian ini, penulis tidak akan menjelaskan atau memaparkan konflik Laut China Selatan antara China dengna Amerika Serikat lewat negara-negara aliansinya. Melainkan, akan berfokus pada dampak dari aktivitas armada laut China di Laut China Selatan kepada Indonesia dalam upaya pengimplementasiaan Poros Maritim. Tentu saja, penelitian ini akan berusaha mengupas kebijakan pemerintah Indonesia atas sengketa di Laut China Selatan, dengan judul “Sikap Indonesia pada masa pemerintrahan Jokowi kepada China dalam menyikapi konflik LCS*”.*

# Identifikasi Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, penulis mempunyai beberapa identifikasi masalah, yakni:

* + 1. Bagaimana dampak sengketa Laut China Selatan terhadap keamanan maritim Indonesia?
    2. Bagaimana peran Indonesia di bawah pemerintah Jokowi dalam penyelesaian sengketa Laut China Selatan?
    3. Sejauh mana dampak diplomasi maritim Indonesia terkait sengketa Laut China Selatan?

# Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya pembahasan kajian ini penulis akan membatasi masalah serta memfokuskan masalah agar tidak meluas serta keluar konteks pembahasan. Penelitian ini hanya difokuskan pada kajian posisi Indonesia selaku negara kepulauan yang berhadapan langsung dalam konflik Laut China

Selatan pada periode tahun 2014-2019 guna mengetahui konflik eksternal serta internal dalam menyikapi China yang mengeklaim kawasan tersebut, yang terjadi di kawasan Laut China Selatan yang bersinggungan langsung dengan Laut Natuna Utara yang yakni bagian kedaulatan dari Indonesia.

# Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah serta beberapa identifikasi masalah yang penulis uraikan, maka rumusan masalah yang penulis coba angkat dalam penelitian ini yakni:

*“Bagaimana Pemerintahan Jokowi menyikapi Sengketa Laut China terhadap Keamanan Maritim Indonesia?”*

# tujuan serta Kegunaan Penelitian

# Tujuan Penelitian

Dari uraian pada identifikasi masalah maka tujuan penelitian ini menggambarkan mengenai sesuatu yang hendak dicapai serta manfaat yang akan diperoleh dengan adanya penelitian ini, sehingga bisa menjadi acuan guna penelitian. Penelitian ini memiliki tujuan yakni :

* + - 1. Untuk mengetahui dampak sengketa Laut China Selatan terhadap keamanan kawasan di Asia Tenggara.
      2. Untuk mengetahui peran Indonesia dalam penyelesaian sengketa Laut China

Selatan,

* + - 1. Untuk mengetahui sejauh mana dampak diplomasi maritim Indonesia terkait sengketa Laut China Selatan.

# Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang sudah penulis paparkan di atas, adapun kegunaan dari penelitian ini, diantaranya:

* + - 1. Kegunaan teoritis dari penelitian ini yakni guna menambah wawasan mengenai dampak konflik laut China selatan terhdapa keamanan laut Indonesia selaku bentuk penguatan serta menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
      2. Kegunaan bagi peneliti diantaranya yakni guna bertanggung jawab dalam memenuhi salah satu syarat mata kuliah praktikum dalam studi hubungan internasional, serta memberikan manfaat baik secara akademik serta mengasah kemampuan dalam melihat fenomena internasional
      3. Secara khusus memberikan informasi kepada pihak lain, penelitian ini di harapkan bisa memberi pengetahuan baru bagi pelajar Hubungan Internasional/umum serta menjadi bahan kajian bagi peneliti berikutnya.